



LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2016



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(L A P A N)**

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, P.O Box 1020/ JAT
Telp. (021)- 4892802, 4895040, Fax (021) 4894815, website : www.lapan.go.id

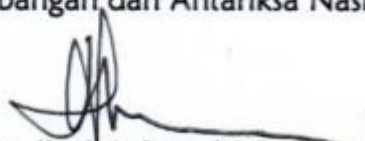
KATA PENGANTAR

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai lembaga penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat pengguna. Oleh karena itu perlu melakukan pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan LAPAN melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dimana pengukuran dilakukan terhadap beberapa unsur pelayanan. Pengukuran SKM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Nilai SKM LAPAN diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Kerja di lingkungan LAPAN. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pimpinan terkait kebijakan yang perlu diambil dalam langkah perbaikan pelaksanaan pelayanan publik mendatang. Selain itu juga sebagai penyerap aspirasi masyarakat berupa masukan, pengaduan atau saran terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh LAPAN. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kami dalam berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan birokrasi yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Jakarta, Desember 2016

Sekretaris Utama
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional


Drs. IL. Arisdiyo, M.Si

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	3
1.4 Maksud Dan Tujuan	4
1.5 Sekilas Tentang Lapan	5
Bab II Metodologi Pengukuran	7
2.1 Pengertian Survei Kepuasan Masyarakat	7
2.2 Survei Kepuasan Masyarakat Di LAPAN	8
2.3 Tahap Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	9
Bab III Hasil dan Pembahasan	12
3.1 Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat	12
3.2 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2016	15
Bab IV Kegiatan Pendukung Survei Kepuasan Masyarakat	18
Bab V Penutup	45
Daftar Lampiran	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hasil Pengolahan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja di lingkungan LAPAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring tuntutan masyarakat terhadap pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat.

Hal ini dapat diketahui dari berbagai pengaduan maupun keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media, seperti media massa dan jaringan sosial. Seperti menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Sehingga memberikan dampak buruk terhadap unit pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka SKM dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

dimana Instansi pemerintah diamanatkan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Tetapi dua tahun sebelumnya LAPAN sudah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pelaksanaan SKM tahun 2016 merupakan pembuktian LAPAN dalam melakukan pengukuran SKM yang berkesinambungan agar masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan LAPAN, serta sebagai upaya meningkatkan kinerja dan perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan publik.

1.2. DASAR HUKUM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk melihat gambaran pelayanan publik yang telah diberikan LAPAN kepada masyarakat/pengguna berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3. UNSUR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana Pasal 4 menyebutkan : Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei sesuai kebutuhan. Dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan : Penyelenggara pelayanan publik mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survei yang digunakan.

Dengan prinsip pelayanan sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN&RB tersebut, maka LAPAN telah menyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk formulir kuesioner dengan menggunakan ruang lingkup yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri PAN&RB dan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan LAPAN. Adapun kuesionernya meliputi 9 ruang lingkup, 15 dimensi dengan menggunakan skala likert yaitu sebagai berikut :

RUANG LINGKUP	DIMENSI		PARAMETER (SKALA LIKERT)
a) Persyaratan	Kejelasan Persyaratan	D1	1 2 3 4
b) Prosedur	i) Kejelasan prosedur	D2	1 2 3 4
	ii) Kesederhanaan prosedur	D3	1 2 3 4
c) Waktu pelayanan	Standar waktu penyelesaian pelayanan	D4	1 2 3 4
d) Biaya/Tarif	Kewajaran biaya	D5	1 2 3 4
e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	i) Kejelasan produk	D6	1 2 3 4
	ii) Kualitas produk	D7	1 2 3 4
f) Kompetensi pelaksana	Pengetahuan dan ketrampilan pelaksana	D8	1 2 3 4

RUANG LINGKUP	DIMENSI		PARAMETER (SKALA LIKERT)
g) Perilaku Pelaksana	i) Sikap pelaksana	D9	1 2 3 4
	ii) Budaya kerja yang melayani	D10	1 2 3 4
h) Maklumat Pelayanan	Kesanggupan pelaksana	D11	1 2 3 4
i) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	i) Ketersediaan dan keberfungsian sarana pengaduan	D12	1 2 3 4
	ii) Kemudahan akses	D13	1 2 3 4
	iii) Kecepatan respon	D14	1 2 3 4
	iv) Efektifitas penanganan pengaduan	D15	1 2 3 4

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pengukuran SKM adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari secara berkala SKM Satuan Kerja di lingkungan LAPAN sebagai penyelenggara pelayanan publik sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Satuan Kerja di lingkungan LAPAN.
4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari Satuan Kerja pelaksana SKM sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.

5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik Satuan Kerja di lingkungan LAPAN dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan SKM yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Satuan Kerja di lingkungan LAPAN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus keluhan terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini guna meningkatkan pelayanan publik.

1.5. SEKILAS TENTANG LAPAN

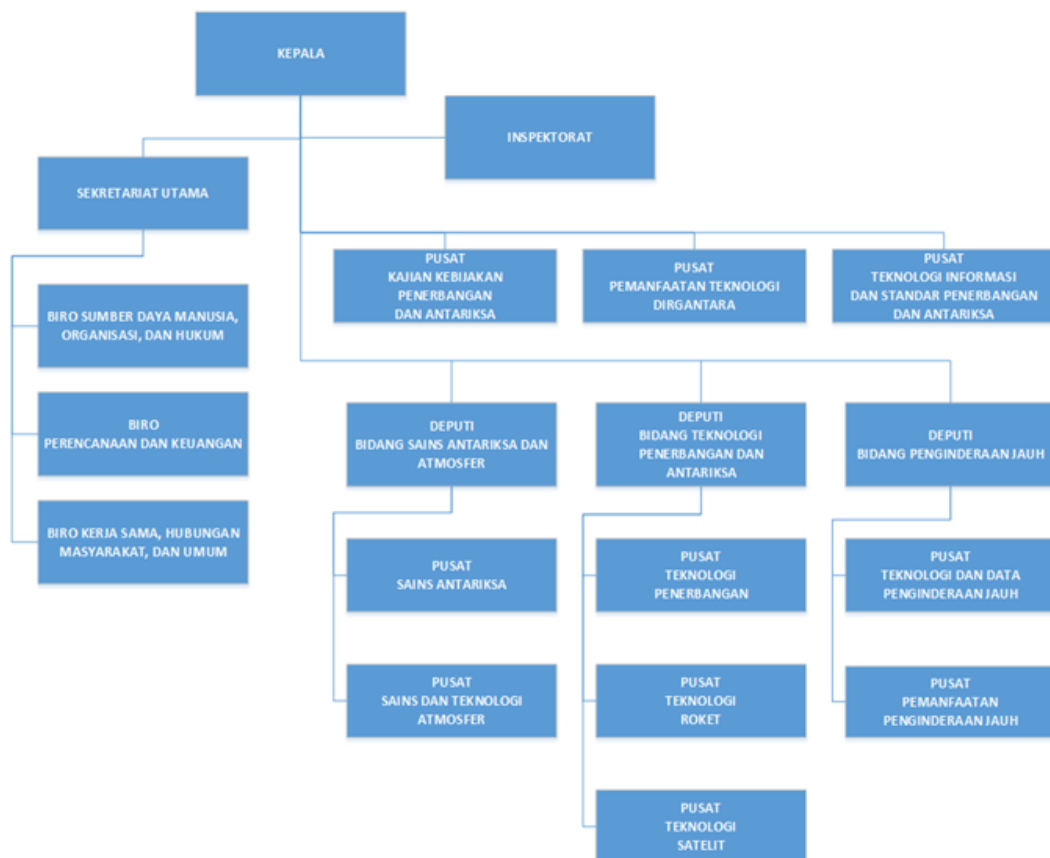


Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berdiri pada tahun 1963, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2015. LAPAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, LAPAN menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;

- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
- c. Penyelenggaraan keantariksaan;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lapan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan lapan;
- f. Pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa;
- g. Pelaksanaan penjaralan teknologi penerbangan dan antariksa;
- h. Pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan sistem informasi penerbangan dan antariksa;
- i. Pengawasan atas pelaksanaan tugas lapan; dan
- j. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.



Struktur Organisasi LAPAN

BAB II

METODOLOGI PENGUKURAN

2.1 PENGERTIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Masyarakat/pengguna memberikan pendapatnya terhadap 4 (empat) pilihan (skala likert) jawaban yang tersedia yaitu :

- Skor 1 adalah nilai Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali);
- Skor 2 adalah nilai Tidak (setuju/baik) atau kurang;
- Skor 3 adalah nilai Setuju (baik/suka);
- Skor 4 adalah nilai Sangat (setuju/baik/suka).

Berikut adalah nilai persepsi, nilai interval IKM, nilai interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kineja Unit Pelayanan
1.	1,00-1,74	25,00 - 43,75	D	Tidak baik
2.	1,75-2,49	43,76 - 62,50	C	Kurang baik
3.	2,50-3,26	62,51 - 81,25	B	Baik
4.	3,27-4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik

2.2 SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LAPAN

Penyusunan SKM LAPAN dihasilkan dari pengolahan SKM Satuan Kerja di lingkungan LAPAN. Pada tahun 2016 diharapkan Satuan Kerja di lingkungan LAPAN menyusun SKM berdasarkan Standar Pelayanan Publik (SPP) masing-masing Satuan Kerja yang telah disahkan oleh Kepala LAPAN dari 21 Satuan Kerja di lingkungan LAPAN.

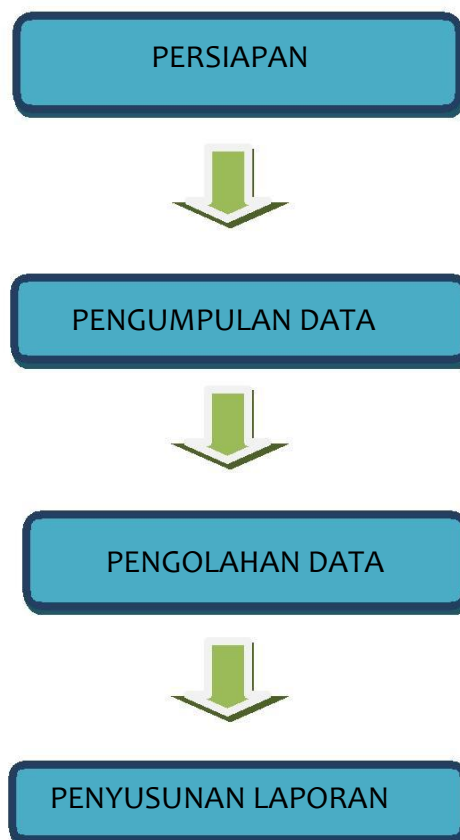
21 Satker di lingkungan LAPAN yang telah melakukan SKM kepada masyarakat/pengguna, yaitu :

1. Inspektorat;
2. Biro Kerjasama, Humas dan Umum;
3. Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Biro SDM, Organisasi dan Hukum;
5. Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;
6. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh;
7. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh;
8. Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;
9. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer;
10. Pusat Sains dan Antariksa;
11. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang;

12. Pusat Teknologi Penerbangan;
13. Pusat Teknologi Satelit;
14. Pusat Teknologi Roket;
15. Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh, Biak;
16. Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
17. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam;
18. Pusat Teknologi dan Informasi dan Standart Penerbangan Antariksa;
19. Balai Penamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak;
20. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan;
21. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa.

2.3 TAHAP PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Kegiatan survei SKM melalui tahapan sebagai berikut :



Kegiatan SKM dimulai pada awal Januari 2016 di masing-masing Satuan Kerja di lingkungan LAPAN. Dalam survei digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner ini disusun berdasar tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Proses penyebaran kuesioner kepada responden dilakukan melalui pengisian langsung, email, dan faksimile. Respondennya yaitu internal (Satuan Kerja di lingkungan LAPAN) dan eksternal (masyarakat atau pengguna pelayanan Satuan Kerja).

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Pengumpulan data di lapangan dengan melakukan survei kepada responden. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan pada Satuan Kerja di lingkungan LAPAN. Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi excel. Proses dan analisis data seperti berikut ini : sehingga terstandarisasi secara nasional. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan

“Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung SKM terhadap 9 ruang lingkup pelayanan yang dikaji, setiap dimensi pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,111) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Hasil survei Satuan Kerja di lingkungan LAPAN disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting bagi LAPAN yang menyajikan informasi dari olahan dan analisis data yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan strategis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 PENGUKURAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (LAPAN)

Pada tahun 2016, seluruh Satuan Kerja di lingkungan LAPAN telah melakukan survei kepada masyarakat/pengguna terkait pelayanan publik yang telah dilakukan. Sebanyak 21 Satuan Kerja di lingkungan LAPAN yang melakukan survei yaitu :

- a. Inspektorat;
- b. Biro SDM, Organisasi dan Hukum;
- c. Biro Kerjasama, Humas dan Umum;
- d. Biro Perencana dan Keuangan;
- e. Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;
- f. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh;
- g. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh;
- h. Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;
- i. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer;
- j. Pusat Sains dan Antariksa;
- k. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang;
- l. Pusat Teknologi Penerbangan;
- m. Pusat Teknologi Satelit;
- n. Pusat Teknologi Roket;
- o. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa;
- p. Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh, Biak;
- q. Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
- r. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam;
- s. Pusat Teknologi dan Informasi dan Standart Penerbangan Antariksa;
- t. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak;
- u. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan.

Jumlah responden yang bersedia mengisi kuesioner di masing-masing Satuan Kerja dengan nilai SKMnya disajikan seperti di bawah ini :

NO.	SATUAN KERJA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI SKM
1.	Inspektorat	75	79,11
2.	Biro SDM, Organisasi dan Hukum	165	79,88
3.	Biro Perencana dan Keuangan	96	79,69
4.	Biro Kerjasama, Humas dan Umum	1.197	81,62
5.	Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	51	80,46
6.	Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	74	81,39
7.	Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	353	89,77
8.	Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare	172	83,15
9.	Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer	60	88,99
10.	Pusat Sains dan Antariksa	52	85,62
11.	Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang	581	88,57
12.	Pusat Teknologi Penerbangan	278	84,07
13.	Pusat Teknologi Satelit	411	84,71
14.	Pusat Teknologi Roket	96	76,39
15.	Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh, Biak	61	79,39
16.	Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut	75	85,69
17.	Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam	597	89,37
18.	Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa	13	84,80

NO.	SATUAN KERJA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI SKM
19.	Pusat Teknologi dan Informasi dan Standart Penerbangan Antariksa	152	71,53
20.	Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak	316	90,06
21.	Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan	82	83,98
Total		4883	83,25

Dari tabel di atas terdapat 4883 responden sebagai masyarakat/pengguna pelayanan publik yang diberikan oleh Satuan Kerja di lingkungan LAPAN yang terdiri dari internal (Satuan Kerja di lingkungan LAPAN) dan eksternal. Responden tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan LAPAN kepada masyarakat. Dari hasil pengolahan SKM Satuan Kerja di lingkungan LAPAN didapatkan nilai SKM LAPAN yaitu **83,25**. Satuan Kerja dengan jumlah responden paling sedikit yaitu Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa sejumlah 13 responden dan responden paling banyak yaitu Biro Kerjasama, Humas dan Umum sejumlah 1.123 responden. Satuan Kerja dengan nilai SKM terendah yaitu Pusat Teknologi dan Informasi dan Standart Penerbangan Antariksa yang mempunyai nilai SKM 71,53 dan nilai SKM tertinggi yaitu Pusat Sains Antariksa dengan nilai SKM 90,06.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SKM yaitu dalam Peraturan Menteri PAN&RB tidak adanya jumlah minimal responden dalam pelaksanaan survei ini, sehingga hasil yang diberikan apakah bisa mencerminkan kualitas pelayanan publik yang diberikan atau tidak. Jika survei dilakukan berbasis SPP, maka jumlah responden akan berpecah, sehingga responden untuk masing-masing SPP hanya sedikit jika dibandingkan survei tidak berbasis SPP.

3.2 NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2013-2016

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan SKM Satuan Kerja di lingkungan LAPAN. Ternyata untuk empat tahun pelaksanaan SKM terjadi fluktuatif hasil nilai SKM. Dimana pada tahun 2013 nilai IKM = 78,03, tahun 2014 nilai IKM turun menjadi 77,27, pada tahun 2015 nilai SKM 79,30, dan pada tahun 2016 memperoleh nilai SKM 83,25. Artinya tahun ini terjadi kenaikan nilai SKM LAPAN dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Diharapkan ditahun-tahun mendatang nilai SKM LAPAN bisa terus meningkat. Pelaksanaan SKM ini penting dilaksanakan setiap tahunnya agar diketahui bagaimana peningkatan kualitas pelayanan yang telah diberikan LAPAN (melalui tiap-tiap Satuan Kerja) kepada masyarakat/ pengguna setiap tahunnya.

NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAPAN

TAHUN 2013 – 2016

LAPAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI SKM
2013	1288	78,03
2014	1579	77,27
2015	1437	79,30
2016	4883	83,25

Nilai SKM tersebut sudah di laporkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tanggal 20 Januari 2017. Namun masih ada data SKM yang masuk setelah dilaporkan, seperti Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh yang seharusnya nilai SKM LAPAN yaitu 83,73. Hal tersebut menjadi evaluasi untuk LAPAN agar tepat waktu dalam memberikan data SKM.

3.3 PENGUKURAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SESTAMA)

Sebanyak tiga Satuan Kerja di lingkungan LAPAN yang melakukan survei di lingkungan Sestama, yaitu Biro Kerjasama, Humas dan Umum, Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara dan Pusat Teknologi dan Informasi dan Standart Penerbangan Antariksa. SKM Sestama diberikan oleh satuan kerja yang memberikan pelayanan kepada responden eksternal artinya responden tersebut bukan dari karyawan LAPAN. Berikut nilai SKM dan jumlah responden dilingkungan sestama LAPAN.

NO.	SATUAN KERJA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI SKM
1.	Biro Kerjasama, Humas dan Umum	1.197	81,62
2.	Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	51	80,46
3.	Pusat Teknologi dan Informasi dan Standart Penerbangan Antariksa	152	71,53
Total		1400	77.82

3.4 PENGUKURAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (BIRO KERJASAMA HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN UMUM)

Sebanyak satu bagian dan dua sub bagian di lingkungan LAPAN yang melakukan survei di lingkungan Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Umum, yaitu Bagian Persuratan dan Arsip, Sub Bagian Publikasi dan Layanan Informasi Publik serta Sub Bagian Edukasi Publik. Berikut nilai SKM dan jumlah responden dilingkungan Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Umum.

NO.	SATUAN KERJA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI SKM
1.	Bagian Persuratan dan Arsip	74	81,17
2.	Sub Bagian Publikasi dan Layanan Informasi Publik	171	81,123
3.	Sub Bagian Edukasi Publik	952	82,13
Total		1.197	81,47

3.5 PENGUKURAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT)

Sebanyak dua Sub Bagian di Bagian Hubungan Masyarakat yang melakukan survei, yaitu Sub Bagian Publikasi dan Layanan Informasi Publik dan Sub Bagian Edukasi Publik. SKM Bagian Hubungan Masyarakat LAPAN diberikan oleh yang memberikan pelayanan kepada responden eksternal artinya responden tersebut bukan dari karyawan LAPAN. Berikut nilai SKM dan jumlah responden dilingkungan Bagian Hubungan Masyarakat LAPAN.

NO.	SATUAN KERJA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI SKM
1.	Sub Bagian Publikasi dan Layanan Informasi Publik	171	81,123
2.	Sub Bagian Edukasi Publik	952	82,13
Total		1.123	81,62

BAB IV

KEGIATAN PENDUKUNG SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

4.1 RAPAT KOORDINASI NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di LAPAN maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah dengan Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan Publik.

LAPAN sebagai Lembaga Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan Publik, Untuk itu Biro KSHU sebagai koordinator terhadap SKM LAPAN, mengundang unit layanan satker di lingkungan LAPAN untuk membahas hal tersebut. Rapat Koordinasi ini diselenggarakan pada hari Kamis, 28 April 2016 di Kantor LAPAN Pusat. Maksud penyelenggaraan rapat koordinasi ini adalah untuk memberikan pedoman dan pemahaman bersama mengenai Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai acuan bagi unit penyelenggara Pelayanan di lingkungan Satker LAPAN dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap setiap jenis layanan yang diberikan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah serbagai berikut:

- a. Mensosialisasikan SKM terkait reorganisasi yang terjadi di LAPAN.
- b. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilakukan oleh unit pelayanan Publik dilingkungan satker yang ada di LAPAN dalam Triwulan I.
- c. Menyelaraskan Ruang Lingkup SKM dengan standar Pelayanan setiap satker
- d. SKM merupakan salah satu program dalam mendukung Reformasi Birokrasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SKM ini dibuka oleh Kepala Biro Kerjasama, Humas dan Umum, Ir. Christianus R Dewanto, M.Eng. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di LAPAN berbasis Survey Kepuasan Masyarakat menjadi salah satu indikator penilaian RB dalam peningkatan tunjangan kinerja pegawai LAPAN nantinya dan Target SKM LAPAN 2016 adalah 80. Beliau juga memaparkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan yang prima sangat ditentukan oleh perangkat birokrasi ditingkat operasional.



Pembicara Survey Kepuasan Masyarakat

Beberapa substansi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain: Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima, Pengelolaan Pengaduan, Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Saat ini Kepala LAPAN menjadikan SKM sebagai Indikator Kinerja Utama dan di harapkan setiap satker dapat melaporkan Hasil SKM Secara berkala. Selanjutnya pemaparan dari Bp. Aris Samson, S.Sos, Kepala Bidang Pelaksanaan, Pemantauan Dan Evaluasi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat, Kemenpan-RB.

Sebagai pembuka, beliau mengapresiasi Prestasi LAPAN dalam melakukan survey kepuasan masyarakat, menurutnya LAPAN akan dijadikan contoh bagi lembaga lainnya dalam mengimplementasikan UU NO.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. LAPAN harus siap apabila ada lembaga lain yang mau studi banding dalam melakukan survey kepuasan masyarakat. Selanjutnya, Lembaga Ombudsman dapat mengevaluasi LAPAN apabila secara konsisten melakukan peningkatan pelayanan publik berdasarkan peraturan dan UUD yang berlaku.

Ruang lingkup survey kepuasan masyarakat dapat diselaraskan dengan standar pelayanan di setiap penyelenggaraan pelayanan publik dengan terciptanya pelayanan publik LAPAN dapat mewujudkan *good governace*: akuntabilitas, transparansi, supremasi Hukum serta menjawab tuntutan public. Dalam kesempatan ini Aris Samson dari Kemenpan & RB mensosialisasikan mengenai SKM sesuai peraturan PERMENPANRB No. 16 Tahun 2014 sebagai pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kepala Bagian Humas, Jasyanto memberikan pandangannya terhadap penyusunan SKM di LAPAN, beliau menginginkan keselarasan dalam ruang lingkup/unsur yang ada di SKM tersebut.



Suasana Rapat Koordinasi Survei Kepuasan Masyarakat

Setiap perwakilan satker memberikan masuknya sesuai dengan standar pelayanan di masing-masing satker. Diskusi dipimpin oleh Kepala Bagian Humas, Jasyanto dan menghasilkan beberapa point kesepakatan sebagai berikut: Ruang lingkup / unsur yang terdapat di SKM mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang Lingkup SKM dalam peraturan tersebut terdiri dari:

No.	UNSUR PELAYANAN
U1	Persyaratan
U2	Prosedur
U3	Waktu pelayanan
U4	Biaya/tariff
U5	Produk layanan
U6	Kompetensi pelaksana
U7	Perilaku pelaksana
U8	Maklumat Pelayanan
U9	Penanganan Pengaduan

Pada TW 2 dan selanjutnya, setiap SKM di Satker dan Balai harus ada minimal 9 unsur diatas dan tidak mencantumkan unsur biaya (U4) namun dapat disesuaikan dengan jenis pelayanan lainnya yang disepakati. BLU sebagai satker pengecualian tetap mencantumkan unsur biaya/tariff (U4) dalam SKM. Skala pengukuran SKM menggunakan Skala Likert 1-4.

Mutu Pelayanan terdiri dari :

- a. A (sangat Baik) : 81,26-100,00 (4)
- b. B (Baik) : 62,51 – 81,25 (3)
- c. C (Kurang Baik) : 43,76-62,50 (2)
- d. D (Tidak Baik) :25,00-43,75 (1)

Berdasarkan kesepakatan diatas ada beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan setiap satker antara lain: Setiap Satker wajib mengirimkan Laporan SKM Triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

- Triwulan I : 29 April 2016
- Triwulan II : 5 Juli 2016
- Triwulan II : 5 Oktober 2016
- Triwulan IV dan Tahunan : Minggu ke IV Desember 2016

Setiap satker membuat maklumat pelayanan yakni pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. *Follow up* dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari satker sesuai dengan substansi peningkatan kualitas pelayanan publik yang mengacu kepada KemenpanRB yang tertuang pada presentasi Kepala Biro KSHU.

4.2 PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH (PUSTEKDATA) LAPAN RAIH SERTIFIKAT ISO 9001 : 2008

Bertempat di Auditorium Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN (Pustekdata), Pekayon Jakarta Timur, pada Selasa (15/12), Kepala Pustekdata LAPAN Dedi Irawadi menerima sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008 dari lembaga penyedia layanan sertifikasi TUV Nord. Dalam pidato sambutannya, Dedi menjelaskan rangkaian proses pekerjaan Pustekdata dari satuan kerja hingga di kantor pusat pengolahan data tidak putus sehingga dibutuhkan sistem manajemen yang bagus.

husus untuk membenahi sistem manajemen yang dipimpin oleh Peneliti LAPAN Rubini Jusuf. Dengan sertifikat ISO, Pustekdata LAPAN diharapkan mempunyai standard mutu yang bagus dan berkelanjutan karena setiap tahunnya akan dilakukan penilaian. Peraihan yang telah dicapai Pustekdata merupakan langkah awal bagi Pustekdata untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, mengingat Pustekdata menjalankan fungsi sebagai Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN).



Pada saat serah terima sertifikat ISO tersebut, GM TUV Nord Bayu Wicaksana berterima kasih atas kepercayaan LAPAN menunjuk TUV Nord sebagai Badan Sertifikasi ISO untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi dan Data Satelit Penginderaan Jauh. Menurut Bayu, ISO adalah standar internasional sehingga menegaskan Pustekdata LAPAN sebagai bagian dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berstandar sangat baik. Dalam perjalanannya, kata Bayu, Pustekdata LAPAN setidaknya harus melaksanakan internal audit minimal tiga kali dalam satu tahun.

Arsip perlu diawasi dengan seksama, LAPAN memerlukan hal tersebut karena semakin hari hasil litbang LAPAN terus meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, arsiparis diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum LAPAN, Christianus R. Dewanto dalam acara pengayaan ketrampilan arsiparis LAPAN bersama dengan ANRI. Acara bertema Pengawasan Kearsipan Menuju Tertib Pengelolaan Arsip LAPAN tersebut berlangsung pada 24 hingga 25 Mei 2016 di Hotel Neo Green Savana Sentul City, Bogor.



Berbagai macam hal mengenai LAPAN misalnya Undang-Undang Keantariksaan, desain satelit, pesawat tanpa awak, citra satelit, dan pemodelan atmosfer harus dijaga dan disimpan dengan baik. Arsip merupakan informasi penting misalnya dalam perencanaan pengambilan keputusan, sebagai bukti sejarah, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, arsip harus dikelola dengan baik sehingga ketika dibutuhkan arsip selalu siap.



Dalam kesempatan ini, Sekretaris Utama memberikan contoh arsip citra satelit yang digunakan untuk memberikan bukti otentik suatu daerah. Terkait dengan pengawasan arsip, ia mengatakan bahwa LAPAN sangat membutuhkan hal tersebut karena memiliki banyak hasil litbang dan akan terus meningkatkan inovasi litbang yang dihasilkan.

Arsip harus dipelihara karena sebagai identitas bangsa. Arsip merupakan memori kolektif bangsa dan bahan pembelajaran bagi generasi mendatang. Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional RI (Anri). Untuk menjaga arsip diperlukan pembangunan sistem pengelolaan yang meliputi empat pilar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan, ketersediaan SDM kearsipan, penataan arsip, ketersediaan sarana dan prasarana, dan aplikasi pengelolaan arsip.

Selain itu juga diperlukan pengawasan kearsipan yang merupakan proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan dilakukan berdasarkan jenisnya yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan internal. Rudi juga mengatakan bahwa, kelalaian di bidang arsip akan diberikan sanksi administratif atau bahkan pidana karena sudah tertuang dalam UU Kearsipan.

Arsip dalam Pasal 1 UU No 43 Tahun 2009 merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa. Rudi menjelaskan, rekaman tersebut dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Hak keperdataan rakyat juga diarsipkan, selain itu, arsip juga berfungsi sebagai alat bukti hukum,” ujarnya.

(FOKAL) dengan Ketua Sudiyanto, Wakil Ketua Sumantri dan, Sekretaris Royati. Sementara itu, Sekretaris Utama berperan sebagai penasihat dan Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Umum sebagai pembina. Forum ini bermanfaat sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi kearsipan, meningkatkan mutu SDM di bidang kearsipan, meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan, serta mempermudah komunikasi baik internal maupun dengan arsiparis di instansi lain.

4.4 KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMTEK PENGELOLAAN E-JOURNAL JURNAL ILMIAH LAPAN 2016

Aktivitas kegiatan litbang dan operasional LAPAN pada bidang iptek penerbangan dan antariksa telah meningkat yang cukup signifikan. Hal ini diketahui dengan semakin banyaknya produk/hasil litbang maupun data dan informasi beserta turunannya yang telah dikembangkan. Hasil dan capaian dari produk litbang ini telah mendorong para peneliti di lingkungan satker LAPAN untuk mempublikasikan hasil kegiatan penelitiannya. Upaya publikasi ini menjadi prioritas utama dari kegiatan diseminasi hasil litbang LAPAN melalui penerbitan jurnal ilmiah.

Kegiatan penerbitan jurnal ilmiah LAPAN dikelola dan diterbitkan oleh Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat Dan Umum. Saat ini LAPAN memiliki 4 jurnal yang telah terakreditasi di LIPI, seperti Jurnal Teknologi Dirgantara, Jurnal Sains Dirgantara, Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital dan *International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES)*. Namun LAPAN hingga saat ini masih memiliki 1 jurnal yang belum terakreditasi, yaitu Jurnal Analisis Kebijakan Keantariksaan.

Penerbitan jurnal ilmiah LAPAN sebagai sarana penyebarluasan informasi hasil litbang kepada *stakeholder* dan masyarakat ilmiah, baik di Indonesia maupun

internasional. Meningkatnya jumlah produk/hasil litbang dapat dilihat dari jumlah judul makalah atau Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dikirim oleh para peneliti ke sekretariat redaksi. Dimana peningkatan tersebut, seharusnya berbanding lurus antara kuantitas dan kualitas KTI yang diterbitkan. Untuk mencapai harapan ini, maka kami memerlukan sebuah sistem pengelolaan sekretariat redaksi jurnal yang baik melalui standar mutu yang berkualitas, berpengaruh dan dapat dipertanggung jawabkan oleh institusi/lembaga.

Ketentuan mengenai pengelolaan KTI tertuang dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam Undang-Undang itu, disebutkan bahwa penulisan KTI di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

Berdasarkan UU NO. 24 tersebut, sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan akreditasi majalah/jurnal ilmiah adalah LIPI. Sejak tahun 1975, LIPI telah melakukan penilaian akreditasi majalah/jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga litbang di Indonesia. Penilaian ditekankan pada isi dan substansi terbitan, sehingga kriteria penilaian hanya sebatas klasifikasi sifatnya saja, seperti: bersifat ilmiah, semi ilmiah populer, atau campuran antara keduanya. Tahun 2005, LIPI mengeluarkan Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah melalui Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/E/2005, yang merupakan bentuk tanggung jawab LIPI sebagai instansi pembina jabatan fungsional Peneliti.

Sebagai instansi pembina, LIPI menerbitkan peraturan baru, yaitu: Keputusan Bersama Kepala LIPI dengan Kepala BKN Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan

Kegiatan pengelolaan jurnal ilmiah harus berpedoman pada aturan dari LIPI dan selanjutnya dinilai untuk memperoleh status “Terakreditasi”. Pengajuan akreditasi jurnal ilmiah LAPAN dilaksanakan secara regular, dan untuk masing-masing jurnal diakreditasi setiap 3 tahun oleh LIPI. Upaya ini dilakukan Subbagian Publikasi Dan Layanan Informasi Publik dalam rangka memacu peningkatan mutu KTI, serta sebagai kompetitor yang memiliki daya saing dalam pemasyarakatan informasi pemanfaatan produk/hasil litbang dibidang teknologi penerbangan dan antariksa.

Saat ini dinamika pengelolaan publikasi melalui penerbitan jurnal ilmiah (terakreditasi) di Indonesia telah berkembang dan terus meningkat. Tim Pengelola Jurnal Terakreditasi LAPAN pada SubBagian Publikasi Dan Layanan Informasi Publik selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya. Langkah yang ditempuh yaitu mulai dari melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan *e-Journal*, menyusun rencana penerapan *e-Journal* dan selanjutnya jurnal terindeks di lembaga pengindeks internasional.

Langkah ini merupakan tujuan dari program diseminasi dalam pemasyarakatan hasil/produk litbang LAPAN melalui majalah/jurnal ilmiah secara *online*. Dampak positif dari pengelolaan *e-Journal* dan terindeksnya majalah/jurnal ilmiah pada lembaga pengindeks internasional, yaitu makalah menjadi lebih dikenal/dibaca orang dan akan terjadi peningkatan sitasi artikel. Dengan pengelolaan secara *e-Journal*, diharapkan kualitas KTI, manajemen/ pengelolaan terbitan, Penyunting (*Editor*), Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) dan ketepatan waktu dalam sirkulasi naskah/ makalah ilmiah dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

Berdasarkan kebutuhan tersebut diatas, sehingga dipandang perlu diselenggarakan Kegiatan “Sosialisasi Pengelolaan *e-Journal*” di LAPAN. Fokus utama dilaksanakannya kegiatan adalah untuk meningkatkan sistem pengelola dan keahlian profesional Tim Publikasi Ilmiah LAPAN dalam menerapkan *e-Journal*.

Adapun materi kegiatan sosialisasi ini, yaitu mekanisme pengelolaan *e-Journal*, teknik dan metode *maintain* KTI jurnal. Acara sosialisasi dibuka oleh Kepala LAPAN Prof. Thomas Djamaludin yang didampingi oleh Kepala Biro KSHU Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng, dan turut hadir Kapusfatja, para Narasumber, Dewan Penyunting, Tim Sekretariat Redaksi Jurnal Ilmiah Terakreditasi, serta para Peneliti dari Satker (Pekayon, Rumpin, dan Bandung).

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas jurnal ilmiah LAPAN, maka Sekretariat Redaksi perlu melakukan langkah strategis. Upaya ini diantaranya menjaga status “Terakreditasi”, menetapkan standar mutu jurnal ilmiah terakreditasi untuk menjadi acuan dalam pengelolaan penerbitan jurnal ilmiah LAPAN, dan memberikan apresiasi terhadap mutu KTI yang dimuat pada jurnal ilmiah LAPAN melalui *e-Journal*. Upaya ini dilakukan dalam rangka merangsang (menstimulus) dan *mentrigger* para Peneliti dalam pemasyarakatan informasi produk/hasil litbang LAPAN pada *e-Journal*.

Untuk mencapai yang diharapkan, Sekretariat Redaksi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek pengelolaan *e-Journal*, dengan tujuan memberikan pemahaman bagaimana mekanisme sistem pengelolaan *e-Journal* dan meningkatkan keahlian profesional kepada Tim Publikasi Ilmiah LAPAN. Sasaran kegiatan sosialisasi ini adalah tercapainya peningkatan kualitas sistem pengelolaan publikasi ilmiah secara *e-Journal*.

PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

Jurnal ilmiah LAPAN pada tahun anggaran 2016 telah memasuki tahun keempatbelas, sejak terbit pertama kali, yaitu: tahun 2003. Beragam tulisan mengenai pemasyarakatan informasi pemanfaatan teknologi penerbangan dan

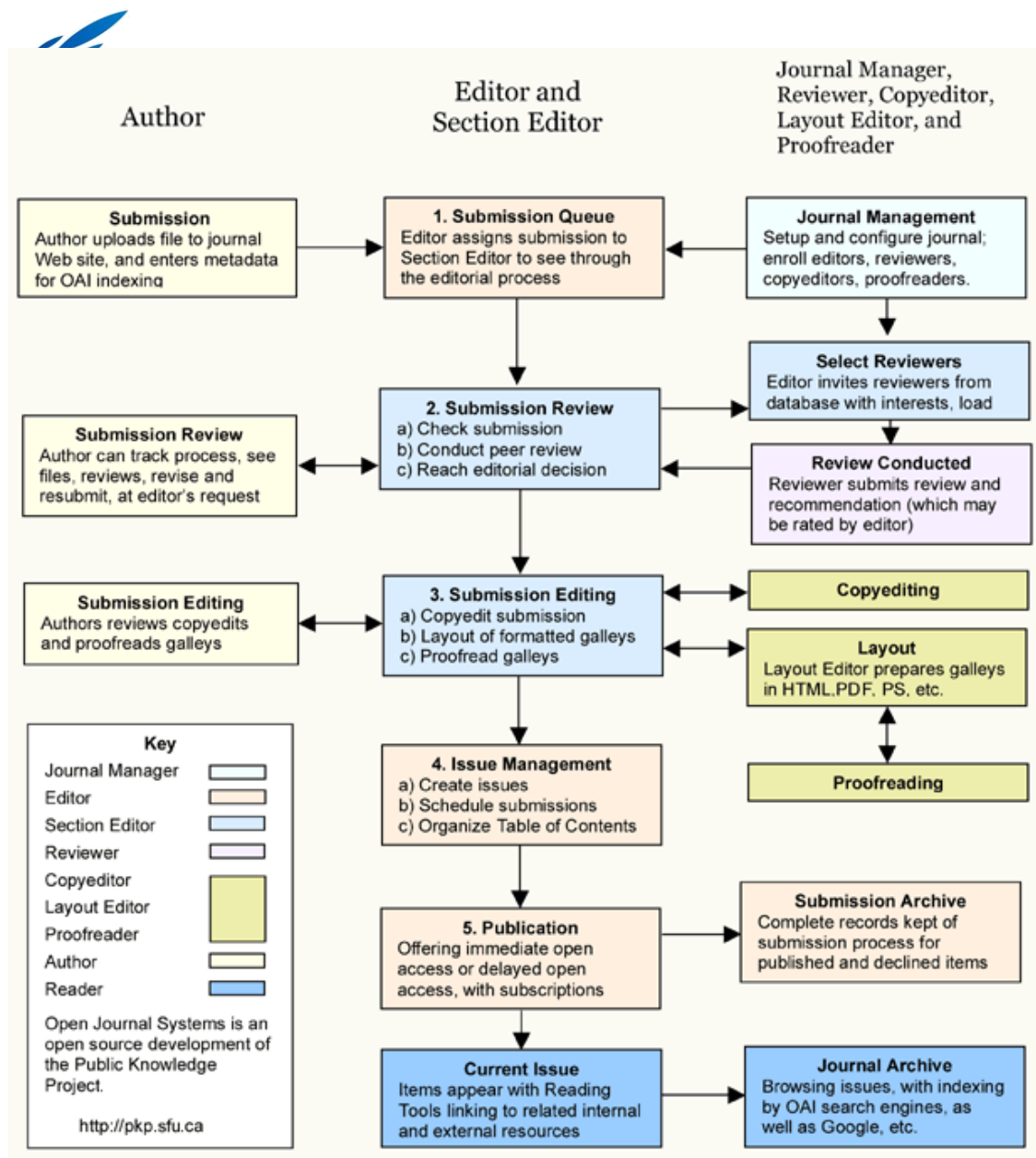
antariksa telah disajikan pada jurnal ilmiah LAPAN. Informasi yang disampaikan meliputi perkembangan teknologi satelit, roket, pesawat terbang, UAV, teknologi penginderaan jauh (inderaja), aplikasi sains antariksa dan atmosfer, serta produk analisis dan informasi kedirgantaraan untuk mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor.

Pengelolaan e-Journal

Hingga 2015 informasi hasil litbang dikemas dalam bentuk cetakan dan dikelola secara konvensional. Mulai pada tahun 2016 ini akan dilakukan pengelolaan jurnal secara elektronik. Proses sirkulasi makalah/paper terekam pada sistem *Open Journal System (OJS)*.

Proses pertamanya adalah makalah disubmit oleh Penulis (*author*) ke sistem, kemudian Ketua Penyunting (*editor in chief*) akan memeriksa makalah. Pada tahapan ini makalah ditelaah oleh Dewan Penyunting (*editor*) dan selanjutnya memberikan saran/ masukan maupun koreksi terkait sistem penulisan di jurnal. Kemudian Sekretariat Redaksi (*section editor*) menindaklanjuti proses sirkulasi makalah berdasarkan rekomendasi dari Ketua Penyunting, yaitu mengembalikan makalah ke Penulis atau mengirim makalah ke Mitra Bestari (*peer reviewer*) apabila makalah tidak ada yang harus diperbaiki oleh Penulis dan dianggap layak. Mitra Bestari tugasnya melakukan penelaahan substansi makalah serta memberikan saran/masukan maupun koreksi. Kemudian Sekretariat Redaksi menindaklanjuti proses sirkulasi makalah, yaitu mengirim makalah ke Penulis beserta saran/masukan maupun koreksi dari Mitra Bestari.

Makalah yang telah dianggap layak terbit akan dilakukan pengecekan dan minta persetujuan terkait tulisan makalah dari Penulis yang dilakukan oleh *Copyeditor*, *Proofreader*, dan selanjutnya makalah di layout oleh *layoutter*.



OJS Editorial and Publishing Process

Sekretariat Redaksi (Section Editor)

Proses sirkulasi makalah/paper terekam pada sistem OJS. Makalah dapat diterbitkan apabila telah sesuai dengan format penulisan jurnal serta dinyatakan

layak oleh Sekretariat Redaksi, Dewan Penyunting dan Mitra Bestari. Makalah adalah asli merupakan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pemikiran yang belum pernah atau tidak sedang dalam proses diterbitkan di media lain. Makalah dikirim dievaluasi oleh Dewan Penyunting dan Mitra Bestari dari segi keaslian (orisinalitas), kesahihan (validitas) ilmiah, dan kejelasan pemaparan. Makalah pada jurnal ditulis secara ilmiah dan terukur agar dapat dipahami dan dimengerti terutama oleh pembaca (peneliti maupun pengguna data di lingkungan instansi/lembaga litbang) yang ingin mengetahui lebih banyak tentang teknologi penerbangan dan antariksa.

Penulis dapat mengusulkan penelaah ahli di luar Dewan Penyunting, yang dianggap memahami betul substansi naskah yang dikirim. Penulis berhak menanggapi hasil evaluasi, sedangkan Penyunting berhak menerima atau menolak serta menyempurnakan naskah tanpa mengurangi isi/maknanya. Naskah yang tidak dimuat, diinformasikan kepada penulis dengan alasan penolakannya. Jurnal ilmiah ini disusun dalam bahasa ilmiah yang terukur dengan segmentasi pembaca adalah: Kepala Pusat di lingkungan Satker LAPAN, para peneliti pada instansi/lembaga litbang dibidang teknologi penerbangan dan antariksa, serta Perpustakaan Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia.

Selain itu distribusi jurnal ini tidak menutup kemungkinan adalah pembaca dari kalangan Profesional, seperti: LSM, Swasta, Dosen/Guru serta masyarakat umum lainnya. Melalui kegiatan penerbitan jurnal ilmiah ini, selain melakukan sosialisasi/promosi produk/hasil litbang LAPAN juga dimaksudkan sebagai media penyebarluasan informasi teknologi penerbangan dan antariksa di Indonesia.

Sekretariat redaksi jurnal ilmiah dalam kegiatan operasionalnya, senantiasa mengundang para penulis untuk mengirimkan makalah. Dalam operasional penerbitan Jurnal sering ditemui beberapa kendala, yakni lambatnya sirkulasi makalah/paper pengiriman dari Penulis ke meja redaksi. Kurangnya jumlah

makalah/paper yang memenuhi syarat untuk dimuat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan redaksi. Untuk mengatasi hal tersebut, Sekretariat Redaksi akan semakin intensif dalam pencarian makalah/paper yang berasal dari penulis luar LAPAN. Hal ini diharapkan dapat menambah bobot kualitas jurnal LAPAN.

Jurnal juga merupakan sarana promosi dan komunikasi antara LAPAN dengan pengguna potensial, maupun antar pengguna inderaja. Untuk itu jurnal/majalah ilmiah ini bersifat terbuka dalam menerima kiriman tulisan dari pembaca luar LAPAN (eksternal). Kondisi seperti ini mendorong redaksi untuk berupaya lebih maksimal guna dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik.

Dewan Penyunting (*Editor*) dan Mitra Bestari (*Peer Reviewer*)

Dewan Penyunting dan Mitra Bestari yang dilibatkan terdiri atas perorangan yang memiliki kualifikasi, pengalaman, komitmen, dan mampu memenuhi tugas sesuai yang diembankan oleh pengelola majalah ilmiah. Komposisi kepakaran Penyunting dan Mitra Bestari yang lengkap, beragam, dan relevan merupakan salah satu indikator bahwa sistem penyuntingan dan penelaahan diterapkan dengan baik. Seyogianya sistem penyuntingan dan penelaahan yang diterapkan suatu majalah ilmiah dijalankan dengan ketat, selektif, dan melalui penyaringan keilmuan yang benar-benar sesuai kepakaran. Kelengkapan dan keragaman bidang ilmu Penyunting dan Mitra Bestari dapat diukur dengan melihat latar belakang bidang ilmu serta kepakaran yang dimiliki Penyunting dan Mitra Bestari.

Komposisi Penyunting dan Mitra Bestari yang pernah menulis di majalah ilmiah akan menunjukkan bahwa Penyunting dan Mitra Bestari yang dilibatkan merupakan orang-orang yang menguasai peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Semakin besar komposisi Penyunting dan Mitra Bestari yang pernah menulis di

ilmiah berkualifikasi internasional, semakin tinggi pula kualifikasi penyuntingan dan penelaahan yang diterapkan.

Dewan Penyunting (Editor)

Pada saat penyuntingan makalah dituntut melibatkan Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) dari lingkungan luas sebagai penelaah ahli. Dewan Penyunting (*Editor*) bertugas untuk menilai dan mengkaji kandungan ilmiah suatu karya tulis ilmiah. Para Penyunting hendaklah terdiri atas perorangan berkualifikasi dan berpengalaman yang mempunyai waktu, kemauan, kemampuan, dan *commitment* untuk melaksanakan penyuntingan suatu karya ilmiah. Pengangkatan resmi sebagai anggota sidang Penyunting dilakukan bukan karena jabatan struktural *ex officio* tetapi karena kualifikasi kepakaran seseorang. Penggarisan tugas (misalnya Penyunting Penyelia, Penyunting Pelaksana, Penyunting Tamu) dinyatakan secara tegas dan gamblang. Cakupan mandat bidang keilmuan agar lengkap terwakili oleh anggota sidang Penyunting. Penyunting Penyelia dapat menetapkan Mitra Bestari lain yang kepakarannya sesuai dengan bidang ilmu makalah yang ditelaah untuk jurnal/majalah ilmiah.

Mitra Bestari (Peer Reviewer)

Merujuk pada ketentuan akreditasi jurnal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penunjukan Penyunting dan Mitra Bestari, seperti berikut ini: penelaahan makalah pada jurnal atau majalah terakreditasi harus melibatkan minimal empat orang Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) dari lingkungan luas sebagai penelaah ahli.

Mitra Bestari bertugas menelaah kandungan ilmiah suatu karya tulis ilmiah seluruh makalah yang akan diterbitkan. Mitra Bestari terdiri atas perorangan berkualifikasi dan berpengalaman yang mempunyai waktu, kemauan, kemampuan, dan *commitment* untuk melaksanakan penelaahan suatu karya ilmiah. Kualifikasi penelaah diutamakan menjabat sebagai Peneliti Utama, Guru besar, dan/atau

berpendidikan Profesor/S3. Pengangkatan resmi sebagai penelaah dilakukan bukan karena jabatan struktural (*ex officio*) tetapi karena kualifikasi kepakaran seseorang. Keterlibatan pejabat struktural sebagai penelaah hendaknya dihindari. Penggarisan tugas Mitra Bestari dinyatakan secara jelas, seperti berikut:

- a) Mitra Bestari dipilih dari lingkungan LAPAN maupun Perguruan Tinggi/lembaga litbang/institusi lainnya atau pakar perorangan berdasarkan bidang kepakarannya,
- b) Daftar Mitra Bestari utama yang bersifat tetap untuk jurnal/majalah ilmiah terakreditasi ditetapkan bersamaan susunan penelaah disertai dengan bidang kepakarannya,
- c) Mitra Bestari hanya menelaah makalah tertentu sesuai dengan kepakarannya dan namanya akan dicantumkan pada halaman akhir setiap nomor terakhir terbitan jurnal/majalah ilmiah,
- d) Mitra Bestari haruslah tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penulis makalah dan bersedia menelaah makalah sesuai batas waktu yang ditetapkan,
- e) Mitra Bestari tidak boleh kontak langsung dengan penulis makalah tanpa izin Penyunting Penyelia.

Ketersediaan KTI

Pada penerbitan jurnal ilmiah LAPAN, masing-masing edisi setiap jurnal terdiri dari makalah-makalah yang telah disusun dalam rangka penyebarluasan informasi teknologi penerbangan dan antariksa.

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2016

Kegiatan penerbitan jurnal ilmiah ini didasarkan pada pengumpulan bahan berupa makalah, naskah, tabel, gambar dan informasi lainnya yang selanjutnya dikelompokkan dan dilayout menjadi *draft* awal yang ditulis pada daftar isi hingga disusun menjadi *draft* final.

Penerbitan Jurnal Inderaja edisi Juni 2016

1. Penerapan Algoritma *Spectral Angle Mapper (SAM)* untuk Klasifikasi Lamun Menggunakan Citra Satelit Worldview-2
(*Spectral Angle Mapper (SAM) Algorithm Application for Seagrass Classification Using Worldview-2 Satellite Imagery*), oleh: Nunung Noer Aziizah, Vincentius Paulus Siregar dan Syamsul Bahri Agus
2. Perbandingan Algoritma *C2WP Boureal Lakes Processor* dan *Regional Water Processor* dalam Ekstraksi Nilai Estimasi Data *Total Suspesnded Solid* Danau Sentani
(*Comparison of C2WP Boureal Lakes Processor and Regional Water Processor Algorithm on Extracting Estimated Total Suspended Solid Data of Lake Sentani*), oleh: M. Aldila Syariz dan Lalu Muhamad Jaelani
3. Studi Pemetaan Pemutihan Terumbu Karang dengan Citra Resolusi Tinggi
(Studi Kasus: Perairan PLTU Paiton Probolinggo)
(*Mapping Study of Coral Bleaching Using High Resolution Images*)
(*A case study: The Water Area of PLTU Paiton Probolinggo*), oleh: Zulfahmi Afifi dan Lalu Muhamad Jaelani
4. Pengaruh Struktur Geologi Terhadap Suhu Permukaan Tanah di Lapangan Panas Bumi Blawan
(*Impact of Geological Structure to Land Surface Temperature on Blawan Geothermal Field*), oleh: Anjar Pranggawan Azhari, Sukir Maryanto dan Arief Rachmansyah

5. Deteksi Gejala Erupsi G. Raung Jawa Timur Menggunakan Normalized Thermal Index dari Data MODIS
(*Detecting The Precursor of Mt. Raung Eruption Using Normalized Thermal Index from MODIS*), oleh: Suwarsono, Hidayat, Totok Suprpto, Fajar Yulianto, Kusumaning Dyah Ayu S, Nurwita Mustika Sari, Zylshal, Parwati dan Wikanti Asriningrum

6. Karakteristik Temperatur Daerah Bekas Kebakaran Hutan/Lahan (*Burned Area*) dari Data Landsat-8 TIRS
(*Temperature Characteristics of Burned Area from Landsat-8 TIRS Data*), oleh: Suwarsono, Any Zubaidah, Parwati dan M. Rokhis Khomarudin
7. Fase Pertumbuhan Tanaman Padi dari Data Citra Landsat-8 Menggunakan Model *Normalize Difference Vegetation Index* (NDVI)
(*Rice Plant Growth Phase of Data Image Landsat-8 Using Model Normalize Difference Vegetation INDEX (NDVI)*), oleh: Johannes Manalu dan Nana Suwargana
8. Aplikasi Data Satelit Radar Sentinel-1A Guna Deteksi Hutan Mangrove; Study Kasus: Segara Anakan, Kabupaten Cilacap
(*Application Of Sentinel-1A Radar Satellite Data For Detection Mangrove Forest Case Study: Segara Anakan, District Cilacap*), oleh: M. Arief, M. Hartuti, Y. Marini, A.K.S. Manoppo, T. Prayogo, R. Hamzah, N. Anggraini, S. Adawiah, N. Suwargana, dan W.K. Harsanugraha
9. Analisis Kepekaan Wilayah Pesisir Terhadap Pencemaran Limbah Padat Berbasis SIG (Studi Kasus Wilayah Pesisir Kota Makassar)
(*Analyze of Sensitivity Coastal Areas on Solid Waste Pollution based on GIS, Case Study: Coastal Areas of Makassar City*), oleh: Nurmawati, Jonson Lumban Gaol, dan Marisa Mei Ling

Penerbitan Jurnal Sains Dirgantara edisi Juni 2016

Daftar judul makalah, yaitu:

1. Analisis Respon Medan Geomagnet Antara Stasiun Di Ekuator Magnet Dan Ekuator Geografis Saat Badai Geomagnet, oleh: Anwar Santoso
2. Distribusi Jenis Awan Di Indonesia Pada Saat El Niño, La Niña dan MJO: Sebuah Studi Kasus, oleh: Suaydhi

Daftar judul makalah, yaitu:

1. Algoritma Deteksi Frekuensi DTMF Menggunakan Korelasi Silang
(*DTMF Frequency Detection Algorithm Using Cross-Correlation*), oleh: Sri Kliwati
2. Analisis Dampak Peredam Niser Silicone Rubber Saat Uji Vibrasi Terhadap Data Sensor Pengindra Gerak pada Roket Eksperimen LAPAN Tipe RX-320, oleh: Kurdianto, Khaula Nurul Hakim dan Salman
3. Penggunaan Penahan Beban dan Pengaturan Azimuth Sudut Serang Roket RUM untuk Operasi Peluncuran pada Kecepatan Angin di Atas 10 Knot
(*Application of Load-Bearing and Azimuth Angle of Attack of Rocket RUM for Launch Operation at Wind Speed More Than 10 Knot*), oleh: Heri Budi Wibowo, Ahmad Riyadl

Penerbitan Jurnal Analisis Kebijakan Keantariksaan edisi Juni 2016

Daftar judul makalah, yaitu: (*makalah belum tersedia*)

Penerbitan *International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences* (IJReSES) edisi Juni 2016

Daftar judul makalah, yaitu: (*makalah belum tersedia*)

SOSIALISASI DAN BIMTEK E-JOURNAL

Dalam rangka pelaksanaan operasional pengelolaan sekretariat jurnal ilmiah secara berkesinambungan, LIPI telah menerbitkan buku Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah. Salah satu penyempurnaan yang signifikan adalah penentuan sistem klasifikasi hasil penilaian, yaitu *majalah ilmiah terakreditasi*.

Langkah tersebut diambil dengan pertimbangan, bahwa sebagian besar terbitan yang telah mendapatkan akreditasi dianggap telah berhasil memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah. Selanjutnya untuk ke depan, jurnal ilmiah tersebut hanya perlu meningkatkan pada sisi kualitasnya saja. Selain itu, dilakukan pembobotan dalam unsur penilaian yang didasarkan atas pertimbangan kualitas jurnal ilmiah.

Jurnal ilmiah LAPAN telah mengajukan akreditasi ulang pada tahun 2015 dan telah mendapat nilai B, sebagai Jurnal Terakreditasi. Standar penilaian jurnal menggunakan Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah sesuai Peraturan Kepala LIPI Nomor: 04/E/ 2011 Tentang Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas makalah pada jurnal ilmiah perlu memberikan stimulus kepada para Peneliti LAPAN, yaitu melalui penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan e-Journal.

Pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Dan Bimtek e-Journal di LAPAN acara diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada:

Waktu : 5 dan 6 April 2016.

Tempat : Balai Pertemuan Dirgantara Lt 3 Kantor LAPAN Pusat
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun Jakarta Timur

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2016

Pelaksanaan acara pada hari pertama, yaitu: Rabu 5 April 2016 dilakukan sosialisasi dengan materi sambutan dari Kepala LAPAN dalam upaya memotivasi kepada para Peneliti dan Dewan Penyunting untuk mengembangkan kreativitas sebagai Penulis dan Penyunting yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas publikasi ilmiah LAPAN yang telah terakreditasi di LIPI. Setelah itu dilanjutkan oleh pembicara dari para narasumber dengan materi Peningkatan Publikasi Ilmiah LAPAN, Pengelolaan Publikasi Ilmiah secara *e-Journal*, Publikasi Ilmiah Terindeks di

Pada hari kedua Kamis, 6 April 2016 acara diisi materi Pelatihan *Submit* Publikasi Ilmiah secara e-Journal, *Editing* Publikasi Ilmiah secara e-Journal dan Pemantapan Pengelolaan e-Journal, serta ditutup dengan simulasi sirkulasi makalah secara e-Journal.

Narasumber

1. Prof. Thomas Djamaludin (Ka. LAPAN),
2. Ir. Mahdi Kartasmita, MS., Ph.D (LAPAN), materi presentasi terlampir,
3. Dr. Lukman, S.T., M.Hum (LIPI) , materi presentasi terlampir,
4. Prof. Dr. rer. nat Evvy Kartini (Editor in Chief Jurnal Atom Indonesia BATAN), materi presentasi terlampir,
5. Ely Eliah, S.Sos., M.M (LIPI), materi presentasi terlampir,
6. Dr. Bidawi Hasyim (LAPAN), materi presentasi terlampir,
7. Aam Muharam ST., M.T (Managing Editor MEV).

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2016

Waktu Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek e-Journal

Selasa 5 April 2016

Jadwal	Acara/Materi	Pelaksana
Pukul: 07.30 - 08.00 WIB	Registrasi	Panitia
Pukul: 08.00 - 08.45 WIB	Sambutan/ Ramah Tamah (45 menit)	Prof. Thomas Djamaludin (Ka. LAPAN)
Coffee break (15 menit)		
Pukul: 09.00 - 10.00	Peningkatan Publikasi Ilmiah LAPAN (60	Ir. Mahdi Kartasmita, MS.,

WIB	menit)	Ph.D (LAPAN)
Pukul: 10.00 - 11.00 WIB	Pengelolaan Publikasi Ilmiah secara e-Journal (60 menit)	Dr. Lukman, S.T., M.Hum (LIPI)
Pukul: 11.00 - 13.00 WIB	Publikasi Ilmiah Terindeks di Lembaga Pengindeks Internasional (120 menit)	Prof. Dr. rer. nat Evvy Kartini (Editor in Chief Jurnal Atom Indonesia BATAN)
Ishoma (60 menit)		
Pukul: 14.00 - 15.00 WIB	Publikasi Ilmiah Terakreditasi (60 menit)	Ely Eliah, S.Sos., M.M (LIPI)
Coffee break (30 menit)		
Pukul: 15.30 - 17.30 WIB	Penyuntingan Publikasi Ilmiah (120 menit)	Dr. Bidawi Hasyim (LAPAN)

Rabu, 6 April 2016

Jadwal	Acara/Materi	Pelaksana
Pukul: 07.30 - 08.30 WIB	Pelatihan <i>Submit</i> Publikasi Ilmiah secara e-Journal (60 menit)	Aam Muharam ST., M.T Managing Editor (MEV)
Coffee break (15 menit)		
Pukul: 08.45 - 09.45 WIB	Lanjutan Pelatihan <i>Submit</i> Publikasi Ilmiah secara e-Journal (60 menit)	Aam Muharam ST., M.T Managing Editor (MEV)
Pukul: 09.45 - 11.45 WIB	Pelatihan <i>Editing</i> Publikasi Ilmiah secara e-Journal (120 menit)	Aam Muharam ST., M.T Managing Editor (MEV)
Ishoma (75 menit)		
Pukul: 13.00 - 15.00 WIB	Pemantapan Pengelolaan e-Journal (120 menit)	Aam Muharam ST., M.T Managing Editor (MEV)
Coffee break (30 menit)		
Pukul: 15.30 - 16.30 WIB	Pemantapan Pengelolaan e-Journal (60 menit)	Aam Muharam ST., M.T Managing Editor (MEV)
Pukul: 16.30 WIB s/d selesai	Penutupan	Panitia

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2016

Presentasi disampaikan oleh Narasumber yang disajikan dalam bentuk penyampaian informasi secara jelas dan diikuti dengan acara diskusi (tanya/jawab).

* Pada kegiatan Bimtek, peserta diwajibkan membawa Laptop.

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek e-Journal di LAPAN pada Tahun 2016, dan perolehan makalah untuk edisi 2016, berikut ini adalah

beberapa rekomendasi rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian dan prioritas:

- a. Soialisasi *e-Journal* di seluruh satker LAPAN dalam rangka persiapan alih kelola jurnal dari yang konvensional menjadi pengelolaan jurnal secara *online*,
- b. Peningkatan sistem standar layanan operasional pengelolaan majalah ilmiah Jurnal Inderaja LAPAN menggunakan *Open Journal System (OJS)*,
- c. Program sosialisasi dan asistensi/pendampingan kepada para Peneliti, terutama untuk para Peneliti Muda,
- d. Program peningkatan mutu KTI secara berkelanjutan dengan cara *up grading* mutu substansi pada makalah ilmiah,
- e. Peningkatan kapasitas (*capacity building*) dari para pejabat fungsional peneliti LAPAN, melalui program pelatihan dan pemberian kesempatan melakukan kegiatan studi banding ke Lembaga/Instansi.

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2016

TIM PELAKSANA SOSIALISASI E-JOURNAL

“SOSIALISASI PENGELOLAAN E-JOURNAL”

Penanggung Jawab : Ir. Jasyanto, MM.

(Kepala Bagian Humas)

Ketua Pelaksana : Mega Mrdita. S.Sos. M.Si

(Kasubbag Publikasi Dan Layanan Informasi Publik)

Koord Kegiatan : Yudho Dewanto, ST.

(Staf Publikasi Dan Layanan Informasi Publik)

1. Ir. Mahdi Kartasasmita, MS., Ph.D (LAPAN)
2. Eli Elyah, S.Sos., M.M (LIPI)
3. Dr. Lukman, S.T., M.Hum (LIPI),
4. Prof. Dr. rer. nat Evvy Kartini
Editor in Chief Jurnal Atom Indonesia (BATAN)
5. Dr. Bidawi Hasyim (LAPAN)
6. Aam Muharam ST., M.T Deputy Editor Jurnal MEV (LIPI)

Perlengkapan : M. Lutfi
Peliputan : Zubaedi Muchtar
Administrasi : Royati, S.Sos

Berdasarkan jumlah judul makalah yang akan di terbitkan di jurnal ilmiah pada Tahun 2016 dapat disampaikan, bahwa Jurnal Sains Dirgantara dan Jurnal Teknologi Dirgantara masih kurang jumlah makalah yang akan diterbitkan. Sedangkan untuk Jurnal Analisis Kebijakan Keantariksaan edisi Juni 2016 dan *International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences* (IJReSES) hingga kegiatan sosialisasi dilaksanakan makalah belum tersedia, sehingga perlu dilakukan sosialisasi ke Satker LAPAN.

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2016

Dalam upaya peningkatan kualitas KTI pada jurnal ilmiah, diperlukan sebuah ukuran standar berupa evaluasi yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan dari penerbitan jurnal ilmiah. Untuk menjaga kualitas terbitan diperlukan adanya forum komunikasi antara Sekretariat Redaksi, Dewan Penyunting, dan Mitra Bestari dalam susunan agenda pertemuan Rapat Redaksi. Selain itu juga perlu adanya pertemuan lintas Satker antara Sekretariat Redaksi dengan para Penulis dari Satker LAPAN.

LIPI sebagai Pembina Jabatan Fungsional Peneliti diharapkan dapat terus melakukan pengembangan, peningkatan dan perbaikan secara berkesinambungan, termasuk dalam usaha penyempurnaan Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah. Dengan terbitnya pedoman yang terbaru ini, diharapkan dapat membantu para pengelola majalah ilmiah di lingkungan lembaga litbang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Sekretariat Redaksi.

BAB IV PENUTUP

Dari pengolahan nilai SKM Satuan Kerja di lingkungan LAPAN didapatkan nilai SKM LAPAN yaitu **83,25**. Angka yang berarti kualitas pelayanan LAPAN kepada masyarakat/pengguna hasil litbang LAPAN berkinerja pelayanan “**Sangat Baik**”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di LAPAN secara umum mencerminkan kualitas dalam kategori Sangat Baik.

Tindak lanjut yang akan diupayakan LAPAN dalam meningkatkan pelayanan publik adalah :

1. SKM perlu dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan LAPAN agar dapat diketahui bagaimana kualitas pelayanan publik masing-masing Satuan Kerja kepada masyarakat/pengguna sehingga Satuan Kerja dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat/pengguna serta untuk mengetahui nilai kualitas pelayanan publik LAPAN secara keseluruhan kepada masyarakat/pengguna;
2. Menyusun rencana dan tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan publik berdasarkan SKM Satuan Kerja di lingkungan Lapan;
3. Satuan Kerja di lingkungan LAPAN melakukan SKM berbasiskan SPP yang telah ditetapkan oleh Kepala LAPAN, sehingga dapat diketahui kualitas pelayanan publik untuk masing-masing SPP;
4. Melaksanakan SKM tidak hanya di awal tahun, tetapi diharapkan penyebaran kuesioner dilaksanakan selama tahun berjalan untuk mengetahui nilai kualitas pelayanan publik LAPAN selama satu tahun;
5. Melaksanakan sosialisasi di lingkungan LAPAN terkait survei dan hasil evaluasi SKM;
6. Perlu adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SKM di lingkungan LAPAN.